

LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Pajak Daerah	• Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Bagaimana kemajuan realisasi anggaran Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023?
2.	Retribusi Daerah	• Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Retribusi Daerah dibandingkan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Bagaimana kemajuan realisasi anggaran Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023?
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	• Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Bagaimana kemajuan realisasi anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023?
4.	Lain-lain PAD yang Sah	• Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023? • Bagaimana kemajuan realisasi anggaran Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli periode tahun 2019-2023?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2191/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 15 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : *Pemohonan Data Penelitian*

Kepada Yth. **Badan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah kabupaten Bangli**
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Gede Yuda Ari Dinata

NIM. : 2117051042

Fakultas : Ekonomi

Jurusan/Prodi. : Ekonomi & Akuntansi / S1 Akuntansi

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat melakukan wawancara di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Berli
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Lettu Kanten Gang II Bangli Telp. (0366) 91267
BANGLI - 80613

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 071/134/X/DPMPTSP

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang** : 1. bahwa sesuai Surat permohonan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tertanggal 15 Oktober 2024 Nomor 2191/UN48.13.1/DL/2024 Perihal Permohonan Data Penelitian
2. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian serta pengembangan perlu diterbitkan surat keterangan penelitian.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli memberikan rekomendasi penelitian kepada :
1. Nama : Gede Yuda Ari Dinata
 2. No. KTP : 5108091112020004
 3. Alamat : Br. Dinas Kawan, Desa Penuktukan, Kec. Tejakula, Singaraja
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PAD Kabupaten Bangli
2. Lokasi/Tempat : Kantor Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli
3. Jumlah Peserta : 1 Orang
4. Lama Penelitian : 26 Oktober 2024 - 26 Oktober 2025

Dengan Ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu agar melaporkan kepada pejabat setempat yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud.
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, agar melapor kembali dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi obyek penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan dimana perlu.

Dikeluarkan di : Bangli

Pada tanggal : 28 Oktober 2024



Tembusan :

1. Bupati Bangli cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
2. DANDIM 1626 Bangli di Bangli
3. Kapolres Bangli di Bangli
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Bagian Umum Setda Kab Bangli
6. OPD yang menjadi obyek penelitian
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Hasil Wawancara

Peneliti: Saya ingin bertanya mengenai efektivitas PAD dari tahun 2019 hingga 2023. Saya melihat bahwa pada tahun 2021 angka efektivitasnya mencapai 136,7%. Padahal, umumnya realisasi anggaran yang paling efektif berada di kisaran 95% hingga 100%. Mengapa pada tahun 2021 bisa melebihi 100% hingga mencapai 136,7%?

Informan: Begini, kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 hingga 2021, kita masih berada dalam masa pandemi yang tentu saja berdampak besar terhadap PAD di Kabupaten Bangli. Realisasi penerimaan pajak bisa meningkat karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya adanya pembayaran tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya atau adanya kebijakan tertentu yang mempengaruhi penerimaan daerah.

Peneliti: Dalam perhitungan PAD tersebut, unsur atau jenis pajak apa saja yang dilibatkan?

Informan: PAD terdiri dari berbagai sumber, tetapi khusus untuk pajak daerah, yang kami kelola meliputi sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, retribusi daerah dikelola oleh OPD penghasil masing-masing, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk retribusi sampah, Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir, dan sebagainya.

Peneliti: Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengelola dan meningkatkan PAD?

Informan: Tentu saja, kami menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan pajak daerah. Salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak (WP) yang masih rendah. Beberapa WP cenderung menghindari pembayaran pajak, dan sering kali terjadi ketidaksesuaian antara pelaporan dan realisasi pembayaran pajak. Selain itu, masih banyak potensi Wajib Pajak yang belum terdata secara maksimal. Kendala lainnya adalah keterbatasan SDM dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pajak.

Peneliti: Apa langkah atau solusi yang telah dilakukan BKPAD untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan: Saat ini, kami telah mengambil beberapa langkah strategis. Misalnya, pada tahun 2023, kami telah menambah tenaga pemeriksa pajak sebanyak dua orang. Selain itu, kami membentuk Tim Pengawasan Pajak Daerah yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi terkait lainnya. Tim ini bertugas untuk memastikan kepatuhan WP dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap PAD dapat terus meningkat dan dikelola dengan lebih baik.

Peneliti: Baik, sejak tahun 2021 bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Informan: Secara keseluruhan, PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pajak daerah, terutama Pajak PBB?

Informan: Pajak daerah mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 106%.

Peneliti: Kenapa pada tahun 2023 terjadi penurunan?

Informan: Meskipun realisasi tetap lebih dari 100% dari target, ada beberapa faktor yang memengaruhi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami mengintensifkan pengawasan dan mendorong pembayaran pajak melalui tim monitoring.

Peneliti: Jadi, permasalahan terkait pembayaran pajak sudah ditangani?

Informan: Ya, kami terus mengawasi agar pembayaran pajak tetap optimal dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dari wajib pajak.

Peneliti: Bagaimana dengan efektivitas penerimaan retribusi daerah?

Informan: Retribusi daerah tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan kami. Ada 11 OPD yang menangani retribusi, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk retribusi sampah, Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk retribusi pasar.

Peneliti: Dari data yang kami peroleh, pada tahun 2021 angka retribusi daerah cukup rendah. Apa penyebabnya?

Informan: Tahun 2021 pandemi berdampak signifikan terhadap penerimaan retribusi. Banyak sektor retribusi, seperti parkir, mengalami penurunan karena mobilitas masyarakat berkurang drastis.

Peneliti: Namun, pajak daerah tetap tinggi pada tahun 2021. Apakah ini akibat pembayaran tunggakan dari tahun sebelumnya?

Informan: Ya, bisa jadi. Banyak wajib pajak yang melunasi tunggakan mereka pada tahun itu, sehingga angka realisasi pajak tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi masih terdampak pandemi.

Peneliti: Bagaimana dengan kekayaan daerah yang dipisahkan?

Informan: Kekayaan daerah yang dipisahkan relatif stabil, tidak ada lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti: Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kekayaan daerah yang dipisahkan?

Informan: Kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup aset-aset seperti investasi dalam bentuk deposito dan penyertaan modal pada BUMD yang dikelola oleh instansi tertentu.

Peneliti: Jadi, bidang pajak daerah hanya menangani pajak saja?

Informan: Benar, kami hanya menangani pajak daerah, sementara retribusi dan pendapatan lainnya ditangani oleh OPD terkait.

Peneliti: Bagaimana pertumbuhan PAD selama beberapa tahun terakhir?

Informan: Tahun 2021 menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam kondisi pandemi, kemungkinan karena adanya pembayaran tunggakan pajak. Tahun 2022 mulai meningkat kembali seiring dengan pemulihan ekonomi dan normalisasi aktivitas bisnis.

Peneliti: Bagaimana dengan kenaikan retribusi pada tahun 2022?

Informan: Seiring dengan pemulihan ekonomi, aktivitas bisnis meningkat, sehingga penerimaan retribusi juga naik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti: Baik pak, Terima kasih atas informasinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	1,224,310,217,532.94	1,145,526,171,159.44	93.57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	136,167,572,433.15	121,916,992,922.13	89.53
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	20,225,017,007.00	22,554,154,808.64	111.52
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	37,455,625,721.07	35,923,103,680.00	95.91
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5,832,977,640.30	6,139,575,904.25	105.26
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	72,653,952,064.78	57,300,158,529.24	78.87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1,055,734,445,099.79	994,627,094,451.03	94.21
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	749,194,930,000.00	717,603,456,382.00	95.78
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	17,593,115,000.00	13,146,289,259.00	74.72
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	983,593,000.00	590,155,800.00	60.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	584,470,785,000.00	584,470,785,000.00	100.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	146,147,437,000.00	119,396,226,323.00	81.70
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	104,233,323,000.00	104,233,323,000.00	100.00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	104,233,323,000.00	104,233,323,000.00	100.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	105,212,098,416.79	100,543,755,966.03	95.56
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	105,212,098,416.79	100,543,755,966.03	95.56
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	97,094,093,683.00	72,246,559,103.00	74.41
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	43,190,770,400.00	34,746,559,103.00	80.45
4.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	53,903,323,283.00	37,500,000,000.00	69.57
4.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	32,408,200,000.00	28,982,083,786.28	89.43
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	32,408,200,000.00	28,982,083,786.28	89.43
5	BELANJA	1,051,924,301,990.38	932,554,387,138.01	88.65
5.1	BELANJA OPERASI	851,757,878,372.37	786,595,372,288.04	92.35
5.1.1	Belanja Pegawai	583,437,648,449.96	508,992,887,378.46	87.24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220,877,560,249.41	233,642,084,043.81	105.78
5.1.5	Belanja Hibah	47,023,169,673.00	43,548,635,865.77	92.61
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	419,500,000.00	411,765,000.00	98.16
5.2	BELANJA MODAL	199,166,423,618.01	145,959,014,849.97	73.28
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,497,007,730.80	20,850,661,764.63	55.61
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,913,639,872.81	17,146,822,225.61	68.83
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	134,285,776,014.40	105,696,448,644.73	78.71
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,470,000,000.00	2,265,082,215.00	91.70
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1,000,000,000.00	0.00	0.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1,000,000,000.00	0.00	0.00
6	TRANSFER	210,322,531,727.81	209,267,205,570.00	99.50
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5,768,064,272.81	5,684,919,270.00	98.56
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2,022,501,700.70	1,978,551,200.00	97.83
6.1.3	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	3,745,562,572.11	3,706,368,070.00	98.95
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	204,554,467,455.00	203,582,286,300.00	99.52
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	203,809,585,200.00	202,881,469,800.00	99.54
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	744,882,255.00	700,816,500.00	94.08
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37,936,616,185.25)	3,704,578,451.43	(9.77)
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37,936,616,185.25	37,936,616,185.25	100.00
7.1.1	Penggunaan SilPA	37,936,616,185.25	37,936,616,185.25	100.00
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	37,936,616,185.25	37,936,616,185.25	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	41,641,194,636.68	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

URAIAN	REFF CALK	TA 2020			REALISASI TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1,039,098,885,049.20	1,012,111,114,390.65	97.40	1,180,012,548,084.92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	104,796,184,853.95	104,325,150,582.49	99.55	127,040,435,750.90
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	15,343,694,686.00	20,541,596,069.51	133.88	22,363,776,338.14
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	11,502,983,000.00	11,948,450,442.01	103.87	36,425,214,880.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	5,449,766,367.95	7,089,522,902.70	130.09	6,139,575,904.28
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	72,499,740,800.00	64,745,581,168.27	89.30	62,111,868,628.48
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	900,562,800,195.25	873,872,461,638.16	97.04	1,012,631,616,334.02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	663,309,137,964.00	655,274,340,282.00	98.79	717,603,942,304.00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	15,653,003,814.00	18,601,283,546.00	118.84	13,146,775,181.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1,647,661,150.00	788,276,289.00	47.84	590,155,800.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	538,001,454,000.00	535,235,046,000.00	99.49	584,470,785,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	108,007,019,000.00	100,649,734,447.00	93.19	119,396,226,323.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	116,220,164,000.00	116,220,164,000.00	100.00	104,233,323,000.00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	116,220,164,000.00	116,220,164,000.00	100.00	104,233,323,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	99,497,245,531.25	82,539,408,115.16	82.96	102,144,468,664.02
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	99,497,245,531.25	82,539,408,115.16	82.96	102,144,468,664.02
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	21,536,252,700.00	19,838,549,241.00	92.12	88,649,882,366.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.4.1	21,536,252,700.00	19,838,549,241.00	92.12	34,746,559,083.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	5.1.1.2.4.2	-	-	-	53,903,323,283.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	5.1.1.2.4.3	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	33,739,900,000.00	33,913,502,170.00	100.51	40,340,496,000.00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	33,739,900,000.00	33,913,502,170.00	100.51	40,340,496,000.00
BELANJA	5.1.2	934,890,580,941.41	845,706,694,909.93	90.46	951,781,204,550.25
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	799,299,335,330.44	757,959,587,521.69	94.83	800,516,855,858.28
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	548,107,476,923.23	531,600,679,857.32	96.99	562,942,181,763.46
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	209,012,768,407.21	184,852,123,000.37	88.44	218,885,726,142.82
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	41,998,890,000.00	41,326,584,664.00	98.40	18,346,147,952.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	180,200,000.00	180,200,000.00	100.00	342,800,000.00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	71,915,463,610.97	57,141,114,023.90	79.46	151,264,348,691.97
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	24,802,624,566.90	20,805,708,939.00	83.89	25,943,799,096.63
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	16,819,622,519.00	13,771,387,963.43	81.88	17,359,018,735.61
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	27,903,216,525.07	20,174,998,481.47	72.30	105,696,448,644.73
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2,390,000,000.00	2,389,018,640.00	99.96	2,265,082,215.00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	63,675,782,000.00	30,605,993,364.34	48.07	-
Belanja Tak Terduga		63,675,782,000.00	30,605,993,364.34	48.07	-
TRANSFER	5.1.3	161,125,819,257.71	158,210,966,678.00	98.19	209,250,444,570.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	3,809,699,853.71	3,792,032,485.00	99.54	5,759,778,770.00
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	1,534,369,468.60	1,528,712,600.00	99.63	2,022,171,700.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	2,275,330,385.11	2,263,319,885.00	99.47	3,737,607,070.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	157,316,119,404.00	154,418,934,193.00	98.16	203,490,665,800.00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	5.1.3.2.1	156,543,652,166.00	153,646,466,955.00	98.15	202,789,849,300.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	772,467,238.00	772,467,238.00	100.00	700,816,500.00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1,096,016,400,199.12	1,003,917,661,587.93	91.60	1,161,031,649,120.25
SURPLUS/DEFISIT		(56,917,515,149.92)	8,193,452,802.72	(14.40)	18,980,898,964.67
PEMBIAYAAN	5.1.4	56,917,515,149.92	56,919,478,338.74	100.00	37,936,616,185.25
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	56,917,515,149.92	56,919,478,338.74	100.00	37,936,616,185.25
Penggunaan SilPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	56,917,515,149.92	56,919,478,338.74	100.00	37,936,616,185.25
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	65,112,931,141.46	-	56,917,515,149.92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021					
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.160.404.968.369.00	1.150.283.515.663.56	(10.121.452.705.44)	99.13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.586.087.540.00	163.537.095.767.82	43.951.008.227.82	136.75
1.1.1	Pajak Daerah	15.736.500.000.00	23.318.329.220.50	7.581.829.220.50	148.18
1.1.2	Retribusi Daerah	18.655.912.422.00	8.281.617.975.00	(10.084.294.447.00)	43.09
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	4.563.934.318.00	6.101.592.913.01	1.537.658.595.01	133.69
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	80.919.740.800.00	125.835.555.659.31	44.915.814.859.31	155.51
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.003.150.858.829.00	949.349.146.346.74	(53.801.712.482.26)	94.64
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	888.886.210.000.00	857.733.621.031.00	(31.152.588.969.00)	96.50
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.264.648.829.00	91.615.525.315.74	(22.649.123.513.26)	80.18
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.668.022.000.00	37.397.273.549.00	(270.748.451.00)	99.28
1.3.1	Pendapatan Hibah	37.668.022.000.00	37.397.273.549.00	(270.748.451.00)	99.28
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	1.390.517.899.508.00	1.108.810.931.922.90	(191.706.967.585.10)	85.26
2.1	BELANJA OPERASI	846.318.228.661.00	771.933.545.742.31	(74.384.682.918.69)	91.21
2.1.1	Belanja Pegawai	527.238.688.176.00	504.713.738.147.38	(22.524.950.028.62)	95.73
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	308.508.100.164.00	258.938.376.121.93	(49.569.724.042.07)	83.93
2.1.3	Belanja Bunga	2.135.777.083.00	138.750.000.00	(1.997.027.083.00)	6.50
2.1.4	Belanja Hibah	8.187.967.238.00	7.904.115.473.00	(283.851.765.00)	96.53
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	247.696.000.00	238.566.000.00	(9.130.000.00)	96.31
2.2	BELANJA MODAL	297.640.091.284.00	183.280.091.201.59	(114.360.000.082.41)	61.58
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.128.378.682.00	40.977.923.944.00	(18.150.454.738.00)	69.30
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.267.444.825.00	89.033.687.223.59	(76.233.757.601.41)	53.87
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Listrik	68.951.343.677.00	49.366.499.234.00	(19.584.844.443.00)	71.60
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.292.924.100.00	3.901.880.800.00	(390.943.300.00)	90.89
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000.00	3.409.319.517.00	(2.590.680.483.00)	56.82
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000.00	3.409.319.517.00	(2.590.680.483.00)	56.82
2.4	BELANJA TRANSFER	150.559.579.563.00	150.187.975.462.00	(371.604.101.00)	99.75
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.410.243.000.00	3.410.243.000.00	0.00	100.00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	147.149.336.563.00	146.777.732.462.00	(371.604.101.00)	99.75
	SURPLUS / (DERISIT)	(140.112.931.139.00)	41.472.583.740.66	181.585.514.879.66	(29.60)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.112.931.139.00	75.735.976.450.85	(64.376.954.688.15)	54.05
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.112.931.139.00	65.052.046.750.85	(60.884.388.15)	99.91
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	75.000.000.000.00	10.683.929.700.00	(64.316.070.300.00)	14.23
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETO	140.112.931.139.00	75.735.976.450.85	(64.376.954.688.15)	54.05
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	117.208.560.191.51	117.208.560.191.51	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.143.205.070.988,00	1.105.440.499.488,50	(37.764.571.519,50)	96,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.126.416.528,00	144.005.842.858,50	(3.120.573.670,50)	97,88
4.1.01	Pajak Daerah	21.862.350.000,00	36.707.060.479,07	14.844.710.479,07	167,90
4.1.02	Retribusi Daerah	45.249.975.000,00	36.328.299.106,20	(8.921.675.833,80)	80,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.327.748,00	5.597.430.541,18	577.102.792,18	111,50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.993.763.780,00	65.373.052.672,05	(9.620.711.107,95)	87,17
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	995.207.663.459,00	960.732.038.900,00	(34.475.624.559,00)	96,54
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.842.424.560,00	805.096.462.637,00	(26.745.961.923,00)	96,84
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.365.238.899,00	155.135.576.263,00	(8.229.662.636,00)	94,96
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	870.991.000,00	702.617.710,00	(168.373.290,00)	80,67
4.3.01	Pendapatan Hibah	870.991.000,00	702.617.710,00	(168.373.290,00)	80,67
5	BELANJA DAERAH	1.321.729.701.480,00	1.239.853.052.692,60	(81.876.648.787,40)	93,81
5.1	BELANJA OPERASI	864.171.523.836,00	802.381.255.582,79	(61.790.268.253,21)	92,85
5.1.01	Belanja Pegawai	542.479.696.508,00	515.867.247.541,00	(26.612.408.967,00)	95,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.036.954.923,00	273.729.368.016,95	(33.307.586.906,05)	89,15
5.1.03	Belanja Bunga	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	(1.548.709.274,43)	68,04
5.1.05	Belanja Hibah	9.547.987.238,00	9.234.589.134,27	(313.398.103,73)	96,72
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	261.196.000,00	253.030.998,00	(8.165.002,00)	96,87
5.2	BELANJA MODAL	312.893.319.489,00	293.929.282.841,81	(18.964.036.647,19)	93,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	(259.249.431,00)	98,20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.300.747.644,00	60.358.662.837,00	(5.942.084.807,00)	91,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.928.218.376,00	180.104.496.229,81	(5.823.722.146,19)	96,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.494.451.733,00	37.746.357.806,00	(6.748.093.927,00)	84,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.776.228.636,00	1.585.342.300,00	(190.886.336,00)	89,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,68
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,68
5.4	BELANJA TRANSFER	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	(63.891.812,00)	99,95
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	5.867.500,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	(69.759.312,00)	99,95
	SURPLUS / DEFISIT	(179.524.630.492,00)	(134.412.553.224,10)	44.112.077.267,90	0

Printed By SIMDA-ANG | 102



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1	PEMBAYARAN	181.524.630.492,00	178.295.260.106,06	(3.229.370.385,94)	98,22
6.1.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.208.560.192,00	117.202.607.549,06	(5.952.642,94)	99,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	(3.223.417.743,00)	94,99
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBAYARAN NETTO	178.524.630.492,00	175.295.260.106,06	(3.229.370.385,94)	98,19
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	6,00	40.882.706.881,94	40.882.706.881,94	0



 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.371.333.400.926,00	1.264.668.588.709,20	(106.664.812.216,80)	92,22
1	ASLI DAERAH (PAD)	255.527.244.826,00	219.918.641.353,81	(35.608.603.472,19)	86,06
1.01	Pajak Daerah	49.239.015.000,00	52.316.682.159,00	3.077.667.159,00	106,25
1.02	Retribusi Daerah	89.550.144.000,00	87.457.453.950,00	(2.092.646.050,00)	97,55
1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.522.380.000,00	5.987.399.995,98	4.465.019.995,98	393,61
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.215.725.326,00	104.313.105.249,73	(26.902.620.076,27)	79,50
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.114.886.421.100,00	1.041.925.817.049,00	(72.960.604.051,00)	93,46
2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	912.844.132.000,00	900.285.215.914,00	(12.558.916.086,00)	98,62
2.02	Transfer Antar Daerah	202.042.289.100,00	141.640.601.135,00	(60.401.687.965,00)	70,10
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	919.735.000,00	2.824.130.306,39	1.904.395.306,39	307,06
3.01	Pendapatan Hibah	804.735.000,00	2.709.130.306,39	1.904.395.306,39	336,65
3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA DAERAH	1.411.219.210.750,00	1.292.282.977.582,22	(118.936.233.167,78)	91,57
1	BELANJA OPERASI	951.563.767.487,00	914.648.663.716,91	(36.915.103.770,09)	96,12
1.01	Belanja Pegawai	565.287.279.009,00	543.502.784.759,00	(21.784.494.250,00)	96,15
1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.805.994.000,00	291.007.733.555,91	(11.798.260.444,09)	96,10
1.03	Bunga	4.437.465.040,00	4.504.878.363,00	(132.786.677,00)	97,14
1.05	Belanja Hibah	78.570.333.438,00	75.439.846.039,00	(3.130.487.399,00)	96,02
1.06	Belanja Bantuan Sosial	262.896.000,00	193.421.000,00	(69.475.000,00)	73,71
2	AMOGAL	291.056.034.403,00	211.649.206.855,31	(79.406.827.547,69)	72,72
2.01	Belanja Modal Tanah	10.815.000.000,00	7.778.752.574,00	(3.036.247.426,00)	71,93
2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.585.584.902,00	24.351.077.732,00	(2.234.507.170,00)	91,60
2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.302.850.759,00	133.121.744.861,03	(56.181.105.897,97)	70,32
2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.985.978.652,00	45.773.863.865,79	(17.212.114.786,22)	72,67
2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	822.795.300,00	85.109.295,00	(737.686.005,00)	10,34
2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	543.824.700,00	538.658.527,50	(5.166.172,50)	99,05
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0
3.01	Belanja Tidak Terduga	2.102.258.760,00	0,00	(2.102.258.760,00)	0
4	TRANSFER	186.497.150.100,00	185.985.107.010,00	(512.043.090,00)	99,69
4.01	Belanja Bagi Hasil	12.017.402.100,00	12.017.402.100,00	0,00	100,00

Printed By SIMDA-NG | 1

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.479.748.000,00	153.967.704.910,00	(512.043.090,00)	99,67
	SURPLUS / DEFISI	(39.885.809.824,00)	(27.614.388.873,02)	12.271.420.950,98	0
1	PEMBIAYAAN	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	745.456,71	100,00
1.01	Penerimaan Pembiayaan	40.882.706.879,00	40.883.452.335,71	745.456,71	100,00
2	EMBIYAN	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0
2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	996.897.055,00	0,00	(996.897.055,00)	0
	PEMBIAYAAN NETTO	39.885.809.824,00	40.883.452.335,71	997.642.511,71	102,50
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	13.289.063.462,69	13.289.063.462,69	0



RIWAYAT HIDUP



Gede Yuda Ari Dinata lahir di Penuktukan pada tanggal 11 desember 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sudiarta dan Ibu Sariati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Desa Penuktukaan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Penuktukan dan lulus tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Tejakula dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tejakula Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan melanjutkan ke S1 Prodi Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD Kabupaten Bangli” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Gede Yuda Ari Dinata